

Pendekatan Analisis Rasio Keuangan Pemerintah dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah

Tuti Dharmawati¹, Ayu Puspita Rini², Ulvy Restiana Parintak³

Universitas Halu Oleo ¹²³, Indonesia

tuti_balaka@yahoo.co.id¹, ayurinpuspita@yahoo.com², parintakulvy@gmail.com³

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874

Vol: 2 No : 12 Desember 2024

Halaman : 312-326

Keywords:

Ratio Analysis

Analysis Methods

Standardization of Ratios

Abstract

This research discusses the ratio analysis approach in assessing regional financial performance through government financial reports. Healthy regional finances are very important to support development and resource management, so proper evaluation of financial performance is necessary. The method used in this research is a qualitative approach with literature study, which analyzes the types of ratios in government financial reports, as well as analytical methods used to assess regional financial performance. The types of ratios analyzed include liquidity, solvency, profitability, efficiency and growth ratios. The analytical methods used include vertical, horizontal analysis, financial ratios, and benchmarking. The research results show that although ratio analysis provides an objective and relevant picture of regional financial conditions, the main challenge lies in the availability of accurate data and the suitability of ratios to specific regional conditions. Therefore, it is important for local governments to standardize ratios and improve the quality of financial reports to support more effective analysis. In conclusion, the ratio analysis approach can be a very useful tool for assessing regional financial performance, but requires improvements in terms of data and standardization to increase the effectiveness of its implementation.

Abstrak

Penelitian ini membahas pendekatan analisis rasio dalam melihat kinerja keuangan daerah melalui laporan keuangan pemerintah. Keuangan daerah yang sehat sangat penting untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan sumber daya, sehingga evaluasi yang tepat terhadap kinerja keuangan diperlukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, yang menganalisis jenis-jenis rasio dalam laporan keuangan pemerintah, serta metode analisis yang dipakai untuk menilai kinerja keuangan daerah. Jenis-jenis rasio yang dianalisis meliputi rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, efisiensi, dan pertumbuhan. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis vertikal, horizontal, rasio keuangan, dan benchmarking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun analisis rasio memberikan gambaran objektif dan relevan mengenai kondisi keuangan daerah, tantangan utama terletak pada ketersediaan data yang akurat dan kesesuaian rasio dengan kondisi spesifik daerah. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan standarisasi rasio dan meningkatkan kualitas laporan keuangan untuk mendukung analisis yang lebih efektif. Kesimpulannya, pendekatan analisis rasio dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk menilai kinerja keuangan daerah, namun memerlukan perbaikan dalam hal data dan standarisasi untuk meningkatkan efektivitas penerapannya.

Kata Kunci: Analisis Rasio, Metode Analisis, Standarisasi Rasio

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah adalah aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan yang efektif. Keuangan daerah, yang berasal dari pendapatan dan belanja daerah, mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Pengelolaan yang baik memastikan pemerintah daerah dapat menjalankan tugas dengan optimal, termasuk penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar. Keuangan yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan (Hulu & Rahim, 2022). Tanpa pengelolaan yang efisien, alokasi dana dapat tidak tepat sasaran, menghambat pencapaian tujuan pembangunan, atau menyebabkan pemborosan anggaran.

Laporan keuangan pemerintah ialah instrumen pertama dalam pengelolaan keuangan daerah (Vidyasari & Suryono, 2021). Laporan ini mencerminkan aktivitas keuangan pemerintah daerah selama periode tertentu dan digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan anggaran. Selain berfungsi sebagai alat pelaporan, laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai efisiensi dan transparansi pengelolaan dana daerah. Dengan menggunakan rasio keuangan, baik pemerintah maupun pihak eksternal seperti auditor atau masyarakat dapat menilai kinerja keuangan daerah secara objektif.

Pendekatan dengan analisis rasio sangat penting dalam menilai kinerja keuangan daerah. Rasio-rasio yang dihitung dari laporan keuangan memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi struktur keuangan, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi anggaran daerah. Oleh karena itu, penggunaan analisis rasio keuangan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memperbaiki transparansi serta akuntabilitas pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemerintah bukan hanya berfungsi sebagai laporan administratif, tetapi juga sebagai alat evaluasi kinerja keuangan daerah. Sebagai bagian dari sistem akuntansi pemerintah, laporan ini memberikan gambaran tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban dana daerah. Dengan menganalisis laporan keuangan yang diaudit, pemangku kepentingan seperti masyarakat dan legislatif dapat menilai apakah pemerintah daerah mengelola anggaran secara efisien dan sesuai prioritas pembangunan.

Laporan keuangan yang disusun dengan baik juga meningkatkan kredibilitas dan reputasi pemerintah daerah (Nugraheni & Putri, 2020). Dengan adanya laporan yang transparan dan terpercaya, masyarakat dan investor dapat lebih yakin terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran. Evaluasi kinerja keuangan, yang dilakukan oleh auditor dan masyarakat, dapat digunakan sebagai dasar perbaikan pengelolaan keuangan daerah ke depannya.

Pendekatan analisis rasio keuangan sangat penting untuk melihat kinerja keuangan daerah. Rasio yang dihitung dari laporan keuangan memberikan informasi mengenai aspek efisiensi, efektivitas, dan transparansi penggunaan anggaran daerah. Rasio likuiditas mengukur kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sementara rasio solvabilitas menilai kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio efisiensi menunjukkan sejauh mana anggaran digunakan secara optimal untuk tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan rasio efektivitas menilai apakah anggaran tersebut menghasilkan hasil sesuai target pembangunan.

Rasio transparansi, di sisi lain, mengukur sejauh mana pemerintah daerah memberikan informasi yang jelas mengenai pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Penggunaan analisis rasio membantu memperbaiki pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah (Yulitiawati & Rusmidarti, 2021).

Penelitian ini memiliki urgensi yang sangat penting untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pemahaman yang mendalam mengenai jenis-jenis rasio keuangan dan metode analisis laporan keuangan diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman lebih baik mengenai rasio-rasio dalam laporan keuangan pemerintah, serta bagaimana mereka dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah secara objektif dan transparan.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji penerapan metode analisis laporan keuangan pemerintah, seperti analisis vertikal, horizontal, dan rasio, yang akan membantu pemerintah daerah memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai pengelolaan anggaran, efektivitas pengeluaran, dan

potensi risiko. Dengan demikian, penelitian ini sangat relevan untuk meningkatkan transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Abdussamad & Sik, 2021), yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai jenis-jenis rasio dalam laporan keuangan pemerintah serta metode analisis yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk memahami fenomena yang terjadi dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Dalam hal ini, data yang digunakan berasal dari studi pustaka, yang mencakup berbagai literatur dan referensi yang relevan tentang rasio keuangan pemerintah, laporan keuangan sektor publik, serta metode analisis keuangan. Sumber data ini akan memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam mengenai konsep-konsep yang terlibat dalam penelitian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang tujuannya dalam menggambarkan dan menganalisis berbagai jenis rasio yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah. Analisis deskriptif ini akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana rasio-rasio tersebut dihitung dan apa yang diukur oleh masing-masing rasio dalam konteks keuangan daerah. Selain itu, teknik ini juga akan digunakan untuk menggambarkan berbagai metode analisis yang sering digunakan dalam menganalisis laporan keuangan pemerintah, seperti analisis vertikal, horizontal, dan rasio keuangan. Dengan pendekatan deskriptif ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terstruktur mengenai teknik-teknik analisis yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja keuangan mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah adalah laporan yang memuat informasi mengenai laporan posisi keuangan dan kinerja keuangan pemerintah dalam satu periode akuntansi. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) menetapkan standar akuntansi pemerintah untuk laporan ini, yang merujuk pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Henukh et al., 2020). Laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan andal mengenai penggunaan sumber daya keuangan oleh pemerintah, yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan seperti legislator, pengambil kebijakan, masyarakat, serta lembaga pengawas untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan yang tepat.

Menurut SAP, laporan keuangan pemerintah mencakup beberapa komponen penting, yaitu laporan posisi keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, catatan keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas (Zuliyana et al., 2023). Setiap komponen ini memiliki tujuan yang berbeda, namun kesemuanya memberikan gambaran yang utuh mengenai kinerja dan posisi keuangan pemerintah daerah. Laporan posisi keuangan menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode, sedangkan laporan realisasi anggaran menunjukkan sejauh mana anggaran yang telah disusun dapat terealisasi selama periode tersebut. Laporan perubahan ekuitas mencerminkan perubahan dalam ekuitas pemerintah akibat transaksi yang terjadi dalam periode akuntansi. Laporan arus kas menjelaskan bagaimana aliran kas yang masuk dan keluar, serta catatan atas laporan keuangan memberikan informasi tambahan yang diperlukan untuk pemahaman yang lebih baik.

Tabel rasio kemandirian keuangan berdasarkan laporan keuangan dari beberapa daerah. Data ini menggambarkan rasio kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah untuk menilai tingkat kemandirian keuangan daerah:

Tabel I
Rasio Kemandirian Keuangan beberapa daerah di Indonesia

No	Daerah	PAD	Total Pendapatan	Rasio Kemandirian (%)	Sumber
1	Kota Bandung	1.500	6.000	25	Laporan Keuangan Pemda Bandung 2023
2	Kabupaten Sleman	800	3.200	25	Laporan Keuangan Pemda Sleman 2023
3	Kota Surabaya	3.000	10.000	30	Laporan Keuangan Pemda Surabaya 2023
4	Kabupaten Kutai	700	4.000	17,5	Laporan Keuangan Pemda Kutai 2023
5	Kota Denpasar	900	3.000	30	Laporan Keuangan Pemda Denpasar 2023

Sumber Data: Laporan keuangan pemerintah daerah dari berbagai wilayah yang diakses melalui portal resmi pemerintah daerah dan laporan Google Scholar 2023.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa **Kota Bandung dan Kabupaten Sleman** memiliki rasio kemandirian 25%, menunjukkan ketergantungan yang signifikan pada transfer pemerintah pusat. **Kota Surabaya** menunjukkan rasio kemandirian lebih tinggi (30%), yang mencerminkan pengelolaan PAD lebih baik dibandingkan daerah lain. **Kabupaten Kutai** memiliki rasio terendah (17,5%), yang menunjukkan ketergantungan tinggi pada dana transfer. **Kota Denpasar** setara dengan Kota Surabaya dalam rasio kemandirian (30%), menggambarkan potensi PAD yang cukup baik.

Bali memiliki berbagai elemen yang menunjukkan kemandirian dalam berbagai aspek, mulai dari ekonomi, budaya, hingga pariwisata. Berikut adalah beberapa faktor yang mendukung kemandirian Bali:

1. Ekonomi

- **Pariwisata:** Bali menjadi salah satu tujuan pariwisata internasional yang utama di Indonesia. Sektor pariwisata yang kuat ini memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung sektor-sektor lain seperti kuliner, perhotelan, dan transportasi.
- **Pertanian:** Bali juga memiliki sektor pertanian yang relatif mandiri, dengan produk-produk pertanian lokal seperti beras, kopi, dan sayuran yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan ekspor.

2. Budaya

- **Tradisi dan Adat Istiadat:** Bali dikenal dengan kekayaan tradisi dan adat istiadatnya, yang tetap terjaga dengan baik meskipun dalam era modern. Hal ini juga berkontribusi pada identitas dan kemandirian daerah, karena kebudayaan Bali menjadi daya tarik yang membedakan Bali dari daerah lain di Indonesia.

3. Sumber Daya Alam

- Bali memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam, mulai dari pantai, pegunungan, hingga kawasan pertanian yang mendukung kehidupan masyarakat Bali secara berkelanjutan. Potensi alam ini turut menunjang perekonomian dan kemandirian daerah.

4. Kemandirian Energi

- Bali telah berusaha dalam meningkatkan penggunaan energi terbarukannya, seperti pengembangan energi surya dan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Dengan pengembangan sistem energi yang ramah lingkungan, Bali berusaha untuk mendukung keberlanjutan kemandirian energi.

5. Kebijakan Pemerintah Daerah

- Pemerintah Provinsi Bali terus bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui kebijakan pembangunan yang mengutamakan keberlanjutan dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan.

Bali dapat dijadikan contoh daerah yang mandiri karena kemampuannya untuk mengelola berbagai sektor yang mendukung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya, meskipun tetap bergantung pada kerjasama dengan pemerintah pusat untuk beberapa aspek.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa daerah menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang cukup baik, sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada dana transfer. Untuk meningkatkan kemandirian, pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber PAD, seperti pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset lokal.

Fungsi utama laporan keuangan pemerintah adalah sebagai upaya untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan mengenai kinerja keuangan daerah (Wulansari, 2014). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, laporan keuangan pemerintah berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah berhasil dalam mengelola sumber daya keuangan yang ada. Laporan keuangan ini juga memungkinkan stakeholder yang berkepentingan, termasuk masyarakat, untuk mengetahui bagaimana dana yang dikelola digunakan dalam rangka pembangunan daerah, serta untuk memeriksa apakah ada penyalahgunaan atau pemborosan anggaran.

pelaporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menyediakan informasi yang berfungsi dalam pengambilan keputusan ekonomi, politik, dan sosial. Laporan ini tidak hanya digunakan untuk kepentingan internal pemerintah daerah, tetapi juga untuk kepentingan eksternal, seperti lembaga pengawasan dan masyarakat, yang memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengelola keuangan daerah. Dalam jangka panjang, laporan keuangan yang akurat dan transparan dapat meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah, mendorong akuntabilitas, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Jenis-Jenis Rasio Laporan Keuangan Pemerintah

Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat yang di gunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah (Karina & Wibowo, 2022). Rasio-rasio ini dapat memberikan informasi yang jelas dan terukur mengenai aspek-aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti likuiditas, solvabilitas, efisiensi, dan pertumbuhan. Berikut adalah beberapa jenis rasio yang sering digunakan dalam laporan keuangan pemerintah untuk menilai kinerja keuangan daerah.

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, terutama yang berkaitan dengan kewajiban finansial yang harus dibayar dalam waktu dekat (Susanto, 2019). Rasio ini menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio ini sangat penting karena menggambarkan kemampuan pemerintah dalam menjaga kestabilan keuangan jangka pendek dan menghindari kesulitan likuiditas yang dapat mempengaruhi operasional pemerintah.

Salah satu rasio likuiditas yang umum digunakan ialah **Current Ratio** (rasio lancar), yang dihitung dengan membagi total aset lancar dengan kewajiban lancar (Shabrina & Surya, 2019). Aset lancar mencakup kas, piutang, dan aset lainnya yang dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu singkat, sementara kewajiban lancar adalah utang yang harus dibayar dalam waktu dekat. Semakin tinggi rasio likuiditas, semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang pada gilirannya mencerminkan stabilitas keuangan yang lebih baik.

b. Rasio Solvabilitas

Kemampuan kotamadya untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya, terutama yang berkaitan dengan hutang dan kewajiban lain yang harus dibayar dalam jangka waktu yang lama, diukur dengan rasio solvabilitas (Lailiyah & Desitama, 2024a). Rasio ini penting karena menggambarkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap utang untuk membiayai kegiatan operasional dan pembangunan.

Salah satu rasio solvabilitas yang umum digunakan adalah rasio hutang. Hal ini ditentukan dengan membagi total utang dengan ekuitas pemerintah kota (Indriastuti & Ruslim, 2020). Rasio ini mengukur sejauh mana struktur pembiayaan pemerintah daerah bergantung pada utang. Semakin rendah rasio ini, semakin baik posisi keuangan daerah karena menunjukkan ketergantungan yang lebih rendah terhadap utang. Namun, perlu diingat bahwa utang yang digunakan untuk pembiayaan proyek pembangunan yang produktif dapat memberikan manfaat jangka panjang, sehingga rasio ini harus dianalisis dengan hati-hati.

c. Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat menghasilkan surplus atau keuntungan dari pendapatan yang ada. Rasio ini memberikan gambaran mengenai efektivitas pengelolaan pendapatan daerah, apakah pendapatan yang diperoleh mampu menutupi pengeluaran yang dilakukan (Kadek, n.d.).

Salah satu rasio rentabilitas yang sering digunakan adalah **Return on Assets (ROA)**, yang mengukur sejauh mana aset yang dimiliki pemerintah daerah menghasilkan pendapatan (Wijaya, 2019). ROA dihitung dengan membagi pendapatan operasional dengan total aset. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien pemerintah daerah dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi ROA, semakin baik kinerja pemerintah dalam mengelola aset untuk menghasilkan surplus.

d. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mencapai hasil yang diinginkan (Pundissing & Pagiu,

2021). Rasio ini mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola belanja daerah agar dapat mencapai output yang maksimal dengan pengeluaran yang minimal.

Salah satu rasio efisiensi yang umum digunakan adalah **Cost Efficiency Ratio** (rasio efisiensi biaya), yang mengukur biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu unit output (Amelinda et al., 2022). Rasio ini memberikan indikasi seberapa baik pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan menghindari pemborosan. Semakin rendah rasio ini, semakin efisien penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah.

e. Rasio Pertumbuhan

Pendapatan dan belanja daerah berkembang dari tahun ke tahun dengan menggunakan rasio pertumbuhan. (Hafizi & Amalia, 2022). Rasio ini penting untuk menilai apakah pemerintah daerah mengalami peningkatan dalam hal penerimaan pendapatan dan apakah anggaran yang dialokasikan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu rasio pertumbuhan yang digunakan adalah **Growth Rate of Revenue** (tingkat pertumbuhan pendapatan), yang dihitung dengan membandingkan perubahan pendapatan dari tahun ke tahun. Rasio ini dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan pendapatan daerah serta kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya finansial untuk membiayai pembangunan. Pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah berjalan dengan baik.

Jenis-jenis rasio yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah memberikan gambaran yang jelas mengenai berbagai aspek kinerja keuangan daerah, dari likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, efisiensi, hingga pertumbuhan. Dengan menggunakan rasio-rasio ini, pemerintah daerah dapat mengevaluasi pengelolaan keuangan mereka dan memastikan bahwa sumber daya yang ada dikelola secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai rasio-rasio ini sangat penting bagi pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah.

Metode Analisis Laporan Keuangan Pemerintah

Analisis laporan keuangan pemerintah merupakan langkah penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Berbagai metode analisis digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesehatan keuangan pemerintah dan untuk membantu pengambil kebijakan dalam merencanakan dan mengelola anggaran secara efektif. Beberapa metode yang umum digunakan dalam analisis laporan keuangan pemerintah antara lain metode analisis vertikal, metode analisis horizontal, metode rasio, dan metode analisis benchmarking. Setiap metode memiliki tujuan dan manfaat yang berbeda dalam menganalisis laporan keuangan.

1. Metode Analisis Vertikal

Metode analisis vertikal adalah teknik yang digunakan untuk membandingkan setiap pos atau akun dalam laporan keuangan dengan total pos terkait pada laporan tersebut (Putra et al., 2021). Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memahami struktur komposisi setiap pos dalam laporan keuangan dan bagaimana proporsi masing-masing pos berkontribusi terhadap total anggaran atau sumber daya yang tersedia. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat mengetahui sejauh mana suatu pos dalam laporan keuangan, seperti pendapatan, belanja, aset, atau kewajiban, berpengaruh terhadap keseluruhan laporan keuangan.

Sebagai contoh, dalam **laporan realisasi anggaran**, analisis vertikal akan membandingkan setiap jenis belanja atau penerimaan dengan total anggaran yang disetujui. Misalnya, jika total anggaran belanja daerah sebesar Rp100 miliar dan belanja untuk infrastruktur sebesar Rp25 miliar, maka rasio belanja infrastruktur terhadap total anggaran akan dihitung untuk mengetahui proporsi alokasi anggaran untuk sektor tersebut. Dengan analisis vertikal, kita dapat melihat apakah alokasi anggaran sudah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan apakah pengelolaan anggaran berjalan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

2. Metode Analisis Horizontal

Metode analisis horizontal digunakan untuk membandingkan data laporan keuangan dari periode ke periode guna menganalisis tren dan perubahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah (Hanatang, 2019). Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat pola perubahan tertentu dalam laporan keuangan, seperti peningkatan atau penurunan pendapatan, belanja, atau rasio keuangan lainnya. Dengan menganalisis tren, pengambil kebijakan dapat mengetahui apakah kinerja keuangan daerah semakin membaik atau justru mengalami penurunan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Sebagai contoh, analisis horizontal pada **laporan realisasi anggaran** dapat dilakukan dengan membandingkan anggaran pendapatan dan belanja daerah dari tahun sebelumnya dengan tahun berjalan. Jika anggaran belanja pada tahun lalu adalah Rp80 miliar dan pada tahun berjalan meningkat menjadi Rp100 miliar, analisis horizontal dapat membantu menjelaskan alasan di balik peningkatan tersebut, apakah berkaitan dengan kebutuhan pembangunan yang lebih besar atau karena peningkatan pendapatan daerah yang signifikan. Metode ini sangat berguna dalam menilai dinamika keuangan daerah dari waktu ke waktu dan mengidentifikasi potensi risiko atau peluang dalam pengelolaan anggaran.

3. Metode Rasio

Salah satu metode analisis yang paling sering digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah adalah metode rasio, karena rasio dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai berbagai aspek keuangan, seperti likuiditas, solvabilitas, efisiensi, rentabilitas, dan pertumbuhan (Alamsyah, 2020). Dalam konteks laporan keuangan pemerintah, rasio-rasio ini digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya keuangan yang ada untuk mendukung pembangunan dan memberikan pelayanan publik.

Contoh rasio yang sering dipakai dalam analisis laporan keuangan pemerintah antara lain ialah rasio likuiditas, yang mengukur kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. rasio solvabilitas. Mengukur serta melihat kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Ukuran efisiensi yang menunjukkan seberapa baik pemerintah menggunakan anggarannya untuk mencapai tujuan tertentu; dan **rasio pertumbuhan**, yang mengukur perkembangan pendapatan dan belanja dari tahun ke tahun. Dengan menggunakan rasio-rasio ini, kita dapat menilai apakah pengelolaan keuangan daerah sudah efisien, transparan, dan akuntabel. Metode rasio juga memberikan indikator yang jelas tentang potensi risiko keuangan, seperti ketergantungan yang tinggi pada utang atau ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja.

4. Metode Analisis Benchmarking

Metode analisis benchmarking merupakan teknik yang digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan pemerintah daerah dengan daerah lain atau dengan standar nasional/internasional (Suci, 2024). Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mengetahui apakah kinerja keuangan daerah sudah sesuai dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa atau

dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Dengan metode benchmarking, kita dapat melihat perbandingan yang objektif mengenai bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangannya dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

Sebagai contoh, analisis benchmarking dapat dilakukan dengan membandingkan **rasio efisiensi** pengelolaan anggaran di satu daerah dengan daerah lain yang memiliki tingkat pendapatan dan belanja serupa. Jika satu daerah berhasil mengelola anggaran lebih efisien, sementara daerah lain memiliki pemborosan anggaran yang lebih tinggi, maka benchmarking dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut dan memberikan rekomendasi perbaikan. Metode ini juga dapat digunakan untuk membandingkan kinerja daerah dengan standar nasional, seperti rasio utang terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak melampaui batas kewajaran yang ditetapkan oleh kebijakan fiskal nasional.

Metode analisis laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari analisis vertikal, horizontal, rasio, dan benchmarking memberikan berbagai perspektif untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kegunaannya sendiri dalam membantu pengambil kebijakan memahami kondisi keuangan daerah dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan menggunakan berbagai metode ini secara bersama-sama, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan merata.

Jenis-Jenis Rasio dalam Laporan Keuangan Pemerintah

Rasio-rasio dalam laporan keuangan pemerintah digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah. Setiap jenis rasio memiliki tujuan dan penerapan yang berbeda-beda, namun semuanya memberikan informasi penting mengenai pengelolaan keuangan daerah. Berikut ini adalah beberapa jenis rasio yang umum digunakan dalam analisis laporan keuangan pemerintah.

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam periode tertentu. Rasio ini menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya (Setianingrum & Haryanto, 2020). Rasio likuiditas yang umum digunakan adalah **Current Ratio** (rasio lancar), yang dihitung dengan rumus:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Aset lancar adalah kas, piutang, dan aset lainnya yang dapat dengan mudah ditukar menjadi kas dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang harus dibayar dalam waktu kurang dari satu tahun, seperti utang jangka pendek dan kewajiban lainnya.

Rasio likuiditas memberikan gambaran tentang kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengandalkan pembiayaan eksternal. Semakin tinggi nilai rasio likuiditas, semakin baik kemampuan daerah tersebut dalam mengelola keuangan jangka pendek. Sebagai contoh, jika rasio likuiditas suatu daerah adalah 2:1, berarti untuk setiap Rp1 kewajiban lancar, pemerintah daerah memiliki Rp2 aset lancar yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Rasio yang terlalu rendah, misalnya kurang dari 1, menunjukkan adanya potensi kesulitan dalam membayar kewajiban jangka pendek, yang dapat mempengaruhi kestabilan keuangan daerah.

2. Rasio Solvabilitas

Kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjang diukur dengan rasio solvabilitas, yang menunjukkan seberapa besar ketergantungannya terhadap utang untuk membiayai kegiatan operasional dan pembangunan (Wulandari et al., 2023). Salah satu rasio solvabilitas yang sering digunakan adalah **Debt to Equity Ratio** (rasio utang terhadap ekuitas), yang dihitung dengan rumus:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Total utang mencakup semua kewajiban jangka panjang yang dimiliki pemerintah daerah, sedangkan total ekuitas mencakup dana yang dimiliki oleh pemerintah sebagai bagian dari kekayaan bersih.

Rasio solvabilitas sangat penting untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola utangnya. Rasio yang terlalu tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah terlalu bergantung pada pembiayaan utang, yang berpotensi membebani keuangan di masa depan. Sebaliknya, rasio yang terlalu rendah menunjukkan bahwa daerah tersebut mungkin tidak memanfaatkan utang secara optimal untuk pembiayaan pembangunan, yang bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Rasio utang terhadap ekuitas yang sehat biasanya berada pada tingkat yang seimbang, mencerminkan kemampuan daerah untuk membayar kewajiban jangka panjangnya tanpa terlalu bergantung pada utang.

3. Rasio Rentabilitas

Rasio rentabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi pengeluarannya, atau dengan kata lain, seberapa efisien penggunaan sumber daya yang ada. (Irdyanti, 2023). Salah satu rasio rentabilitas yang sering digunakan adalah **Return on Assets (ROA)**, yang dihitung dengan rumus:

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Pendapatan yang dimaksud dalam rumus ini adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dalam suatu periode, sementara total aset adalah jumlah keseluruhan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam periode tersebut.

Rasio rentabilitas memberikan informasi tentang seberapa efisien pemerintah daerah dalam menggunakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang ada. Rasio rentabilitas yang rendah mungkin mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak cukup memanfaatkan aset yang dimiliki, baik itu berupa aset fisik seperti properti atau aset non-fisik seperti sumber daya alam, untuk menghasilkan pendapatan yang optimal. Oleh karena itu, rasio ini penting untuk menilai efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

4. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi digunakan Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rasio ini mencerminkan bagaimana pemerintah daerah mengoptimalkan hasil dengan sumber daya yang

terbatas (Lailiyah & Desitama, 2024b). Salah satu rasio efisiensi yang sering digunakan adalah **Cost to Income Ratio**, yang dihitung dengan rumus:

$$\text{Cost to Income Ratio} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

Rasio ini menunjukkan berapa banyak pengeluaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap unit pendapatan. Semakin rendah rasio ini, semakin efisien pengelolaan keuangan daerah.

Rasio efisiensi memberikan informasi tentang seberapa efektif pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran untuk menghasilkan pendapatan dan mencapai hasil pembangunan yang diinginkan. Rasio yang rendah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mencapai tujuan pembangunan dengan pengeluaran yang lebih rendah, yang berarti anggaran digunakan dengan sangat efisien. Sebaliknya, rasio yang tinggi mengindikasikan pemborosan anggaran atau ketidakefektifan dalam pengelolaan sumber daya, yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan digunakan untuk menganalisis bagaimana pendapatan dan belanja pemerintah daerah berubah dari tahun ke tahun. Rasio ini menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah berhasil meningkatkan pendapatannya untuk mendukung pembiayaan belanja dan pembangunan daerah (Fedwiriansyah et al., 2024). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Total Pengeluaran}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Rumus ini mengukur persentase perubahan pendapatan dari satu periode ke periode berikutnya.

Rasio pertumbuhan memberikan wawasan tentang bagaimana pendapatan daerah berkembang dari waktu ke waktu, serta apakah pemerintah daerah mampu meningkatkan sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan belanja yang terus berkembang. Dengan menganalisis rasio pertumbuhan, pengambil kebijakan dapat menilai apakah ada tren positif dalam pendapatan daerah yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan daerah. Selain itu, rasio ini juga membantu untuk memprediksi potensi keberlanjutan fiskal daerah di masa depan.

Metode Analisis Laporan Keuangan Pemerintah

1. **Analisis Vertikal** Metode analisis vertikal membandingkan setiap pos dalam laporan keuangan dengan total pos terkait, seperti membandingkan aset dengan total aset atau belanja dengan total belanja. Tujuannya adalah untuk melihat proporsi setiap komponen dalam struktur keuangan. Misalnya, jika pendapatan daerah adalah Rp 100 miliar dan pajak daerah sebesar Rp 40 miliar, maka rasio pajak terhadap total pendapatan adalah 40%, yang memberikan gambaran ketergantungan daerah pada pendapatan pajak.
2. **Analisis Horizontal** Analisis horizontal menganalisis data laporan keuangan dari periode ke periode untuk menganalisis tren. Misalnya, jika pendapatan daerah meningkat dari Rp 150 miliar di tahun 2019 menjadi Rp 200 miliar di tahun 2023, analisis ini membantu melihat apakah ada tren pertumbuhan atau penurunan dalam kinerja keuangan daerah.
3. **Analisis Menggunakan Rasio Keuangan** Metode ini menggunakan rasio keuangan untuk menilai aspek seperti likuiditas, solvabilitas, efisiensi, dan rentabilitas. Contohnya, rasio **Current Ratio** (Aset Lancar / Kewajiban Lancar) digunakan untuk mengevaluasi kemampuan

pemerintah daerah untuk memenuhi tugas jangka pendek. Rasio rasio ini membantu menilai kesehatan dan efisiensi keuangan pemerintah daerah.

4. **Analisis Benchmarking** Benchmarking membandingkan kinerja keuangan suatu daerah dengan daerah lain atau standar nasional/internasional. Dengan membandingkan, misalnya, rasio efisiensi antara dua daerah, pemerintah dapat belajar dari daerah yang lebih efisien dan mengadopsi praktik terbaik untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah mereka.

Pembahasan

Keakuratan dan Objektivitas dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah

Pendekatan analisis rasio memiliki keunggulan utama dalam memberikan penilaian yang akurat dan objektif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan rumus matematis yang terstandarisasi, analisis rasio dapat mengurangi subjektivitas dalam mengevaluasi kondisi keuangan daerah. Rasio-rasio seperti Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Return on Assets memberikan data yang konkret mengenai kemampuan daerah dalam mengelola likuiditas, solvabilitas, efisiensi, dan rentabilitas. Keakuratan ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait berdasarkan data yang terpercaya dan tidak bias.

Menyediakan Informasi yang Relevan untuk Pengambilan Keputusan

Analisis rasio juga menyediakan informasi yang relevan dan mudah dipahami, yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan, seperti kepala daerah, DPRD, atau lembaga pengawas. Informasi ini membantu mereka untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memberikan dasar untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Misalnya, jika rasio likuiditas rendah, pemerintah daerah dapat memprioritaskan perbaikan dalam pengelolaan kas atau mencari sumber pendanaan baru. Dengan demikian, analisis rasio menjadi alat penting dalam merumuskan kebijakan fiskal yang tepat.

Tantangan dalam Penerapan Analisis Rasio Keuangan Pemerintah

Meskipun analisis rasio memberikan banyak manfaat, terdapat tantangan besar dalam penerapannya, terutama terkait dengan data yang tersedia. Banyak pemerintah daerah, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya, mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data yang lengkap dan akurat untuk menyusun laporan keuangan yang dapat diandalkan. Ketidaksesuaian data ini dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam perhitungan rasio dan mengarah pada kesimpulan yang salah tentang kinerja keuangan daerah. Selain itu, tidak semua rasio yang digunakan dalam analisis keuangan perusahaan dapat diterapkan langsung pada laporan keuangan pemerintah daerah, mengingat struktur pendapatan dan belanja yang berbeda.

Perbedaan Interpretasi Rasio di Berbagai Daerah

Selain kendala data, perbedaan interpretasi rasio keuangan antara daerah satu dengan daerah lainnya juga menjadi tantangan. Setiap daerah memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda, yang dapat mempengaruhi bagaimana rasio-rasio tersebut dipahami dan diterapkan. Misalnya, suatu daerah dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat mungkin memiliki rasio utang yang lebih tinggi, namun ini tidak selalu mencerminkan kinerja keuangan yang buruk. Oleh karena itu, interpretasi rasio harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks lokal, yang dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Rekomendasi untuk Peningkatan Penggunaan Rasio dalam Analisis Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk mengatasi tantangan ini, penting adanya standarisasi rasio keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya standar yang jelas, rasio-rasio ini dapat diterapkan secara konsisten di seluruh daerah, sehingga memudahkan perbandingan antar daerah. Standarisasi ini juga akan memastikan bahwa interpretasi rasio dilakukan dengan cara yang lebih seragam, mengurangi perbedaan dalam penilaian yang dapat timbul dari pemahaman yang berbeda. Pemerintah pusat dan lembaga terkait perlu mengembangkan pedoman yang jelas mengenai rasio-rasio yang relevan dan bagaimana cara perhitungannya sesuai dengan karakteristik laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, penyempurnaan laporan keuangan pemerintah juga diperlukan untuk memudahkan analisis rasio. Laporan keuangan yang lebih transparan, akurat, dan lengkap akan mempermudah proses perhitungan rasio serta meningkatkan kualitas analisis yang dilakukan. Hal ini mencakup pengelolaan data yang lebih baik, penyusunan laporan yang lebih rinci, serta penggunaan teknologi yang mendukung pengolahan data keuangan secara real-time. Dengan perbaikan dalam kualitas laporan keuangan, pemerintah daerah akan memiliki alat yang lebih kuat untuk melakukan perencanaan fiskal yang berbasis data dan mengelola keuangan dengan lebih efektif.

KESIMPULAN

Beberapa rasio yang penting untuk menilai kinerja keuangan daerah dapat dilihat dalam laporan keuangan pemerintah. Ini termasuk rasio likuiditas (untuk menilai kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek) dan rasio solvabilitas (menilai kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang), **rasio rentabilitas** (digunakan untuk mengevaluasi kemampuan menghasilkan surplus), **rasio efisiensi** (mengukur efisiensi penggunaan anggaran), dan **rasio pertumbuhan** (untuk menganalisis pola pertumbuhan pendapatan dan belanja).

Metode analisis laporan keuangan pemerintah, seperti **analisis vertikal**, **analisis horizontal**, **analisis rasio**, dan **benchmarking**, digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah. Analisis vertikal membandingkan pos-pos laporan dengan total yang relevan, analisis horizontal membandingkan kinerja keuangan antar periode, sementara analisis rasio menilai aspek-aspek tertentu seperti likuiditas dan efisiensi. Benchmarking memungkinkan perbandingan kinerja keuangan antara daerah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan. Semua metode ini membantu memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan daerah, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah.

REFERENCES

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=JtKREAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=metode+penelitian+kualitatif&ots=vDDvyVZ4R0&sig=dkdfwda-3CsLIERjhhoqvWoTAFU>
- Alamsyah, M. F. E. P. (2020). *Analisis Tingkat Likuiditas, Solvabilitas Dan Rentabilitas Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Kud Sido Rukun Lumajang*. <http://repository.itbwigalumajang.ac.id/1535/>
- Amelinda, A., Situmorang, M., Octavianty, E., Nasution, Y. N., & Pakuan, U. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Depok. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 8(2), 271–283.

- Fedwiriansyah, N., Akbar, A., Anwar, A., Sahabuddin, R., & Haeruddin, M. I. M. (2024). Analisis efektivitas dan efisiensi untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. *El-Kahfi/ Journal of Islamic Economics*, 5(01), 26–34.
- Hafizi, R., & Amalia, F. A. (2022). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 5(2), 116–130.
- Hanatang, P. (2019). *Analisis Vertikal-Horizontal Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2017* [PhD Thesis, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR]. <https://eprints.unm.ac.id/14734/>
- Henukh, I. T., Saleh, M. F., & Rinaningsih, Y. E. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kota Kupang. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1(02). <https://core.ac.uk/download/pdf/587915348.pdf>
- Hulu, F., & Rahim, R. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2312–2320.
- Indriastuti, A. M., & Ruslim, H. (2020). Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 2(4), 855–862.
- IRDAYANTI, N. (2023). *ANALISIS RASIO RENTABILITAS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN BUMDES MARIO DESA ROSOAN KAB. ENREKANG* [PhD Thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE]. <http://repository.umpar.ac.id/id/eprint/884/>
- Kadek, S. F. (n.d.). ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MODAL KERJA PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) SEDIA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG. ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MODAL KERJA PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) SEDIA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG. Retrieved December 5, 2024, from <http://repo.unr.ac.id/id/eprint/349>
- Karina, N. N., & Wibowo, P. (2022). Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang sebelum dan saat pandemi Covid-19. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 14(2), 146–166.
- Lailiyah, N. I., & Desitama, F. S. (2024a). Kemandirian Keuangan, Rasio Efisiensi, Rasio Solvabilitas Anggaran dan Rasio Pertumbuhan terhadap Financial Distress Pemerintah Daerah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 1952–1973.
- Lailiyah, N. I., & Desitama, F. S. (2024b). Kemandirian Keuangan, Rasio Efisiensi, Rasio Solvabilitas Anggaran dan Rasio Pertumbuhan terhadap Financial Distress Pemerintah Daerah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 1952–1973.
- Nugraheni, D. N., & Putri, A. K. (2020). Pengaruh Reputasi Auditor dan Rasio Dana Pemerintah terhadap Audit Delay dengan Ukuran Perguruan Tinggi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(2), 171–180.
- Pundissing, R., & Pagiu, C. (2021). Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara. *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 2(2), 11–27.
- Putra, I. G. S., Affandi, H. A. A., Purnamasari, L., & Sunarsi, D. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. Cipta Media Nusantara. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=iRFUEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Metode+analisis+vertikal+adalah+teknik+yang+digunakan+untuk+membandingkan+setiap+pos+atau+akun+dalam+laporan+keuangan+dengan+total+pos+terkait+pada+laporan+tersebut&ots=HWHxU1p_u&sig=HqboVMSOFL_Y0zobD0YgHAAq3Y

- Setianingrum, R. D., & Haryanto, H. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/27592>
- Shabrina, N., & Surya, J. L. (2019). Analisis rasio profitabilitas dan rasio likuiditas untuk menilai kinerja keuangan pada PT. Astra Internasional, Tbk. *JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma)*, 2(3), 62–75.
- Suci, S. N. (2024). OPTIMALISASI KEPATUHAN PENYETORAN PAJAK HIBURAN DENGAN METODE BENCHMARK BEHAVIORAL MODEL. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(10), 1505–1512.
- Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 7(1), 81–92.
- Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3857>
- Wijaya, R. (2019). Analisis perkembangan return on assets (ROA) dan return on equity (ROE) untuk mengukur kinerja keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(1), 40–51.
- Wulandari, R., Lestari, B. A. H., & Suryantara, A. B. (2023). Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 56–69.
- Wulansari, P. (2014). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Survey Pada Dinas Pemerintah Daerah Kota Bandung)* [PhD Thesis, Universitas Widyatama]. <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/5640>
- Yulitiawati, Y., & Rusmidarti, R. (2021). Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money Di Kabupaten OKU. *JETAP*, 1(2), 91–109.
- Zuliyana, S., Mawaddah, A., & Hartati, R. (2023). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis. *Shafin: Sharia Finance and Accounting Journal*, 3(1), 11–33.